

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : 1252-Int-KLPPM/UNTAR/IX/2021**

Pada hari ini Jumat tanggal 10 bulan September tahun 2021 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Nataherwin, SE., MM
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Tanjung Duren Utara, No. 1 Jakarta Barat 11470
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul "**Penyuluhan Pajak Untuk Pembangunan Bangsa Kepada Siswa-Siswi SMA Kristen Almasih**"
- (2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini dan Perjanjian Luaran Tambahan PKM.
- (3). Perjanjian Luaran Tambahan PKM pembiayaannya diatur tersendiri.

Pasal 2

- (1). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (2). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (3). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran/draf luaran.
- (5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 3

- (1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Agustus - Desember Tahun 2021

Pasal 4

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada **Pihak Kedua** berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (6). **Luaran wajib** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di **Serina Untar, jurnal ber-ISSN atau prosiding nasional/internasional**.
- (7). Selain luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (6) di atas, **Pihak Kedua** wajib membuat poster untuk kegiatan *Research Week*.
- (8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (*Monev*) PKM.
- (9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah **Desember 2021**

Pasal 6

- (1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 7

- (1). Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pihak Kedua dibantu oleh Asisten Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang identitasnya sebagai berikut:
 - a. Elyn Mareni/125180075/Fakultas Ekonomi/Akuntansi
- (2). Pelaksanaan asistensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Surat tugas yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 8

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D

Pihak Kedua



Nataherwin, SE., MM

**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Honorarium	Rp 0,-
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 7.000.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Honorarium	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
2	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 3.500.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 7.000.000,-
	Jumlah	Rp 3.500.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 7.000.000,-

Jakarta, 2021
Pelaksana PKM



(Nataherwin, SE., MM)



**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LUARAN TAMBAHAN
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : 1253-Int-KLPPM/UNTAR/IX/2021**

Pada hari ini Jumat tanggal 10 bulan September tahun 2021 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Nataherwin, SE., MM.
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Tanjung Duren Utara, No. 1 Jakarta Barat 11470

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Luaran Tambahan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). Perjanjian Luaran Tambahan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut Perjanjian Luaran Tambahan.
- (2). Perjanjian ini dibuat untuk memastikan luaran tambahan dapat tercapai dan diselesaikan dengan baik.
- (3). Besaran biaya pelaksanaan Luaran Tambahan dalam perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 2.000.000** (dua juta rupiah).
- (4). Biaya pelaksanaan sesuai ayat (3) akan diberikan, jika luaran tambahan telah dihasilkan dan diserahkan ke LPPM.
- (5). Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya Luaran Lambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 2

- (1). **Luaran tambahan** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa publikasi di media massa, HKI, dan luaran lainnya (Teknologi Tepat Guna, Model, Purwarupa (*prototype*), Karya Desain/Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur), Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, Buku ISBN.
- (2) Pihak Kedua wajib menyelesaikan luaran tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas.

Pasal 3

- (1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Luaran Tambahan sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.

- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Luaran Tambahan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.

Pihak Kedua

Nataherwin, SE., MM.

**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Biaya Pelaksanaan Luaran Tambahan	Rp 2.000.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-
	Jumlah	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-

Jakarta, 2021
Pelaksana PKM



(Nataherwin, SE., MM.)

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



**PENYULUHAN PAJAK UNTUK PEMBANGUNAN BANGSA
KEPADA SISWA-SISWI SMA KRISTEN ALMASIH**

Diusulkan oleh:
Ketua Tim
Nataherwin, SE., MM dan 0305078102/ 10108013
Anggota:
Elyn Mareni dan 125180075

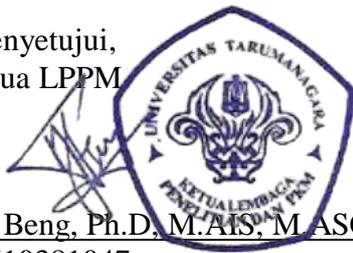
**S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN 2021**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Ganjil 2021/2022

1. Judul Usulan : Pajak Untuk Pembangunan Bangsa Kepada Siswa-Siswi SMA Kristen Almasih
2. Nama Mitra PKM : SMA Kristen Almasih
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : Nataherwin, SE., MM
 - b. NIK/NIDN : 0305078102/ 10108013
 - c. Jabatan : Lektor
 - d. Program Studi : S1 Akuntansi
 - e. Fakultas : Ekonomi
 - f. Bidang Keahlian : Pajak
 - g. Alamat Kantor : FE Untar Blok A lt 14
 - h. Nomor HP/Telp : 081281238259
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : Mahasiswa 1 orang
 - a. Nama mahasiswa dan NIM : Elyn Mareni dan 125180075
5. Lokasi Kegiatan / Mitra:
 - a. Wilayah Mitra : SMA Kristen Almasih
Jl. Kusuma V Blok E1 No.1, RT.10/RW.5
 - b. Kabupaten / Kota : Jakarta Barat
 - c. Propinsi : Jakarta
 - d. Jarak PT ke lokasi Mitra : 5 km
6. a. Luaran Wajib : Makalah Senapenmas 2021
b. Luaran Tambahan : Pintar 2021
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Agustus - Desember 2021
8. Biaya yang disetujui LPPM : Rp. 9.000.000,-

Jakarta, 22 Oktober 2021

Menyetujui,
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D., M.AIS, M. ASCE
NIK10381047

Ketua

Nataherwin SE., MM
NIK 10108013

RINGKASAN

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memenuhi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan untuk membantu memberikan pengetahuan kepada siswa dan siswi sebagai generasi muda bangsa untuk memberikan pengenalan tentang pajak dan pengenalan Universitas Tarumanagara sebagai salah satu pilihan studi lanjut. Mitra kami adalah suatu sekolah SMA di Jakarta. Di sini kita juga membantu salah satu program Direktorat Jenderal Pajak yaitu *Tax Goes to School* yang bertujuan untuk memberikan pengenalan tentang pajak kepada anak-anak usia dini karena merekalah generasi muda bangsa ini. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat pernyataan kerjasama tanggal 29 Juli 2021 dari Bapak Joseph Setiawan selaku Ketua Kepala Sekolah SMA Kristen Almasih.

Target khusus penyuluhan ini adalah memberikan pengetahuan yang memadai mengenai kegunaan pajak bagi pembangunan bangsa untuk siswa-siswi SMA Kegiatan ini akan dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom. Untuk pertamanya kita akan memberikan penyuluhan dalam bentuk ceramah kepada para siswa-siswi SMA untuk diberi pengetahuan pajak yang langsung berat dan bersifat formal, serta harus bersifat fun tapi tetap mengedukasi, disini kita berfokus pada penjelasan manfaat pajak yang bisa dirasakan mereka sejak dini.

Kata kunci: Pajak, Pembangunan Negara

PRAKARTA

Puji adan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan pimpinanNya sehingga kami dapat menyelesaikan pengabdian masyarakat ini.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengabdian masyarakat ini. Khususnya kepada Bapak Joesph Setiawan S.T selaku Kepala Sekolah SMA Kristen Almasih yang telah bersedia melakukan kerjasama dan memberikan dukungan dalam kegiatan ini.

Kami tahu bahwa kegiatan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan ide, saran dan kritik yang akan kami terima dengan senang hati. Kami berharap kegiatan ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan untuk masyarakat.

DAFTAR ISI

	Hal.
RINGKASAN.....	i
PRAKARTA.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Permasalahan Mitra.....	8
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM	8
BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....	
2.1 Solusi Permasalahan.....	9
2.2 Luaran Kegiatan PKM.....	11
BAB 3 METODE PELAKSANAAN.....	
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan.....	12
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....	13
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	14
BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	
4.1 Hasil Yang Dicapai	15
4.2 Luaran Yang Dicapai	19
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	20
4.2 Saran	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Materi Yang Disampaikan pada saat Kegiatan PKM (PPT).....	22
Lampiran II Foto-Foto	27
Lampiran III Luaran Wajib	28
Lampiran IV Luaran Tambahan	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Dari setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selalu ada pemberitahuan bahwa proyek yang dibangun itu dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Untuk itu, diharapkan juga kepada masyarakat, bahwa masyarakat harus menjaga fasilitas-fasilitas yang telah dibangun pemerintah untuk dapat dipakai untuk kepentingan bersama. Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah seyakinya apabila setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan sumber penerimaan terbesar Negara. Dari tahun ke tahun kita dapat melihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan Negara. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan merupakan primadona dalam membiayai pembangunan Nasional. Sedangkan penerimaan dari migas yang dahulu selalu jadi andalan penerimaan negara, sekarang ini sudah tidak bisa diharapkan menjadi sumber penerimaan keuangan Negara terus-menerus karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resources). Penerimaan migas pada suatu waktu akan habis sedangkan dari pajak selalu dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat itu sendiri. Sedangkan penerimaan Negara bukan pajak adalah pengelolaan keuangan Negara yang memberikan kemandirian bagi Negara.

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Di Indonesia sendiri lebih dari 80% penerimaan Negara Republik Indonesia berasal dari pajak. Dalam normalnya APBN yang baik adalah penerimaan utamanya adalah dari pajak, bukan berasal dari pengelolaan Sumber Daya Alam semata, karena salah satu fungsi dari pajak adalah fungsi stabilitas karena dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. ([www.pajak .go.id](http://www.pajak.go.id))

Pembangunan Negara merupakan cerminan kehendak yang terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata, serta

mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis.

Penerimaan Negara merupakan pemasukan yang diperoleh Negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintah, sedangkan sumber-sumber penerimaan Negara berasal dari berbagai sektor dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Sumber-sumber penerimaan Negara antara lain pajak, retribusi, pinjaman, keuntungan BUMN/BUMD, dll. Penerimaan Negara yang paling potensial adalah dari penerimaan pajak itu sendiri. Secara umum, idealnya pendapatan Negara dalam APBN harus selalu meningkat. Hal ini disebabkan oleh belanja Negara yang juga selalu meningkat dari tahun ke tahunnya. Peningkatan pendapatan Negara tersebut baik yang berasal dari penerimaan pajak maupun non-pajak atau yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun sebagai penyumbang penerimaan APBN terbesar, penerimaan pajak lah yang paling diharapkan untuk mengalami peningkatan. Penerimaan Negara dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan sesuai dengan berjalannya perkembangan pembangunan Negara Indonesia.

Di Indonesia pajak merupakan penerimaan Negara terbesar. Pajak memiliki tujuan tujuan mensejahterakan rakyat dengan memperbaiki serta membangun sarana publik. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Pada tahun 1983, Direktorat Jendral Pajak mengubah sistem pemungutan pajak yang sebelumnya adalah official assessment system menjadi self assessment system yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Pajak memiliki peran penting yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara, seperti fungsi utama pajak sebagai anggaran (budgetair) yang mana pajak sebagai sumber pembiayaan negara yang yang paling besar digunakan untuk masukan dana kedalam kas negara sesuai UU yang berlaku, pajak juga sebagai alat pengatur (regulerend), dan alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi unuk pembangunan infrastruktur negara .
(www.kompasiana.com)

Itulah fungsi pajak untuk pembangunan negeri, tetapi kenapa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak tertib membayar pajak, padahal pajak merupakan input terbesar untuk APBN (Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara). Penerimaan pajak pemerintah selalu meleset dari target APBN, contohnya setoran tahun 2016 hanya 81,54 atau Rp. 1.105 triliun dari patokan APB sebesar 1.355 triliun di tahun 2016.

Masyarakat harus mengetahui penggunaan uang pajak. Mengutip data Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, nilai Rp 1 triliun uang pajak dimanfaatkan untuk membangun jalan, infrastruktur lain, dan 20 persen dari APBN digunakan untuk pendidikan, uang pendidikan 20 persen dari belanja negara sebesar Rp 2.000 triliun.

Mengingat pentingnya peran penerimaan di bidang pajak dalam suatu negara dan dalam program Nawacita ke-3 Presiden RI Joko Widodo 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan' dan percepatan pembangunan infrastruktur di Papua yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka sudah sepantasnya kita sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak kita harus bisa melakukan *effort* lebih dalam bekerja dalam menghimpun pajak, karena peran kita sebagai penghimpun penerimaan negara sangat mempengaruhi masa depan bangsa kita.

Dengan pembangunan infrastruktur yang tinggi akan mempercepat pembangunan negara. Pada tiga tahun terakhir pemerintah fokus dalam pembangunan infrastruktur jalan dan Saat ini pemerintah fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia dalam meningkatkan daya saing negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital.

Ketika keadaan infrastruktur di sebuah negeri lemah, itu berarti bahwa perekonomian negara itu berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi, berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing (karena biaya bisnis yang tinggi).

Infrastruktur yang kurang memadai juga mempengaruhi daya tarik iklim investasi di Indonesia. Investor asing penuh kekhawatiran untuk berinvestasi di, misalnya, fasilitas manufaktur di Indonesia kalau pasokan listrik tidak pasti atau biaya transportasi sangat tinggi. Hal-hal demikian jelas membuat para investor berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia.

Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak mau membayar pajak, contohnya seperti masyarakat tidak percaya dengan UU dibidang perpajakan dan masyarakat banyak yang tidak percaya dengan petugas perpajakan, masyarakat belum patuh membayar pajak karena alasan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dinilai ribet. Orang akan membayar pajak apabila mengisi SPT jauh lebih murah.

Di masa kini, kebutuhan akan pengetahuan perpajakan sangatlah mendesak bagi semua wajib pajak baik wajib pajak Badan maupun wajib pajak orang pribadi. Dengan berkembangnya dunia usaha saat ini, Dirjen Pajak dalam rangka mengumpulkan dana untuk pembangunan dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi wajib pajak yang patuh, sadar dan berdedikasi, maka dikeluarkannya berbagai Peraturan perpajakan baru.

Mendengar kata-kata yang berhubungan dengan kewajiban membayar pajak sering kali membuat kepala menjadi pusing. Selain kesannya yang rumit dan membingungkan, sebagian orang juga merasa keberatan harus menyisihkan penghasilannya demi pajak. Padahal, pajaklah yang membuat kita dapat menikmati jalan raya, jembatan, penerangan jalan, dan segudang fasilitas umum lainnya.

Menurut Siti Resmi (2013) pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi.

Penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam jumlah nominal maupun persentase terhadap jumlah keseluruhan pendapatan negara. Di sisi lain persentase Wajib Pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah.

Menurut Widayati dan Nurlis yang dikutip dalam penelitian Ramadiansyah, Sudjana, & Dwiatmanto (2014) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak salah satunya adalah kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan sangatlah penting, hal tersebut akan mendorong kesadaran masyarakat terutama Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Masrurroh Siti & Zulaikha (2013) yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Disisi lain pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair), yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti: belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend), yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya: dalam rangka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3. Fungsi Stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi

dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Bagi suatu negara, generasi muda adalah akar dari bangsa tersebut. Pemuda adalah potensi yang sangat besar dan masih mudah untuk dibentuk agar dimasa depan mereka bisa menjadi perantara yang membawa Indonesia ke puncak kejayaannya. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar, sehingga tanpa pajak maka negara ini tidak bisa terus bergerak maju dikarenakan tidak ada adanya dana. Apabila di masa lalu pahlawan adalah mereka yang memagang tombak dan pedang untuk berjuang meraih kemerdekaan, maka sekarang pahlawan adalah mereka yang mau membayar pajak untuk menjaga eksistensi dari negara ini dan juga mereka yang mau berkarya agar bangsa ini diakui dan dihormati oleh bangsa lain. (www.pajak.go.id)

Dewasa ini, banyak sekali orang-orang yang masih belum mengerti tentang pajak dan juga tidak senang dengan pajak, sejatinya mereka hanya tidak mengetahui tentang manfaat pajak dan apa yang bisa diperoleh dari membayarnya. Oleh karena itu

pengetahuan tentang pajak sangat dibutuhkan sejak dini untuk membentengi masyarakat dari *stereotype* pajak yang buruk dan salah, pembekalan semacam ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga misalnya, orang tua bisa memberikan pemahaman kepada anak bahwa kemudahan akses yang dimiliki keluarga, ketercukupan Sumber Daya Alam, dan juga banyaknya penyedia kebutuhan sehari-hari adalah hasil dari ayah yang membayar pajak setiap bulannya. Dari lingkungan keluarga inilah anak akan memahami bahwa sebenarnya uang yang kita bayarkan setiap bulannya adalah untuk kebutuhan kita sendiri. Pada saat anak berada di lingkungan sekolah, guru bisa mengajarkan kepada anak-anak bahwa karena pajaklah mereka bisa menikmati fasilitas sekolah karena bangunan sekolah, fasilitas yang ada di sekolah, dana operasional sekolah dan juga gaji dari guru-guru mereka berasal dari uang pajak yang dibayarkan warga negara yang taat membayar pajak.

Kemudian dari lingkungan masyarakat, anak-anak bisa belajar bahwa fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat adalah hasil dari uang pajak yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang akan berguna untuk masyarakat luas karena bisa menjadi jembatan untuk tercapainya pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Uang pajak yang berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak akan disalurkan keseluruh instansi dan akan digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan juga untuk membiayai operasional kantor-kantor pelayanan publik dan untuk membayar gaji ASN yang sudah bekerja untuk negara ini.

Pada tahun 2021 ini, Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu program pajak bertutur. Pajak bertutur virtual tahun ini mengusung tema “Generasi Muda Sadar Pajak, Wujud Bela Negara”. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan dilaksanakan secara serentak oleh seluruh unit vertikal direktorat jenderal pajak di Indonesia. Tujuan kegiatan adalah menumbuhkan kesadaran pajak bagi pelajar sekolah dasar (sd), sekolah menengah pertama (smp), sekolah menengah atas (sma), dan mahasiswa perguruan tinggi (pt). Secara khusus, topik bahasan tahun ini adalah memberikan pemahaman tentang manfaat pajak dalam penanganan pandemi covid-19, diantaranya pengadaan vaksin dan bantuan sosial masyarakat.

Siswa-siswi SMA Kristen Almasih sebagai calon mahasiswa S1 Akuntansi sudah selayaknya diberikan penyuluhan mengenai kewajiban membayar pajak sebagai warga negara agar memiliki wawasan yang lebih luas dan siap menghadapi studi lanjut.

Mitra kami adalah suatu sekolah SMA dimana siswa dan siswi-nya perlu pengetahuan lebih mengenai pajak. Maka kami dari tim dosen akan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan melalui daring/*online*. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada siswa dan siswi sebagai generasi muda bangsa untuk memberikan pengenalan tentang pajak.

1.2 Permasalahan Mitra

Karena mitra kami adalah siswa-siswi SMA belum memahami kegunaan pajak bagi pembangunan Negara dan sedang mencari alternatif untuk studi lanjut di Perguruan Tinggi yang sesuai dengan bidang peminatannya. Maka Kepala Sekolah SMA Kristen Almasih meminta kami selaku team dosen agar dapat membantu mereka dalam memberikan pengenalan tentang pajak dan pengenalan Universitas Tarumanagara.

Berdasarkan analisis situasi di atas, prioritas permasalahan mitra kami adalah:

1. Bagaimana memahami kegunaan pajak bagi pembangunan Negara?
2. Bagaimana mekanisme pajak sebagai pendanaan Negara?
3. Bagaimana mekanisme pajak?
4. Bagaimana mengenalkan Universitas Tarumanagara sebagai salah satu alternatif untuk studi lanjut di Perguruan Tinggi?

1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Hasil pengabdian masyarakat ini adalah bentuk kerjasama kami sebagai dosen Fakultas Ekonomi dalam membantu mempromosikan Tarumanagara dengan cara memberikan penyuluhan tentang pajak. Sehingga bahan penyuluhan bisa dipakai oleh siswa siswi SMU untuk menambah pengetahuan mereka.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi beberapa dosen akuntansi pajak dalam memberikan penyuluhan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan bangsa dan Pengenalan Prodi S1 Akuntansi FE Untar agar dapat berkontribusi sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. SMA Kristen Almasih terbuka untuk kegiatan ini dan mengundang kami, sehingga diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pencerahan kepada siswa-siswi SMA Kristen Almasih untuk mempersiapkan siswa-siswinya studi lanjut. Penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak, seperti adanya prasangka negatif dari masyarakat terhadap ketidakterbukaannya pemerintah terhadap penggunaan uang dari pemungutan pajak. Selain itu, minimnya informasi mengenai perpajakan ataupun cara membayar pajak mengakibatkan pembayaran pajak terhambat. Selain itu dalam penyuluhan ini, diharapkan dapat meningkatkan generasi milenial akan pentingnya dan manfaat pajak.

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan bukan saja berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya dalam meningkatkan pemerataan pendidikan dan mutu pendidikan.

Pada era globalisasi saat ini masyarakat Indonesia dituntut untuk menjadi masyarakat yang berpendidikan, untuk menguasai berbagai hal dan kemampuan. Selain itu dapat memberikan dan meningkatkan kemampuan adalah dengan bersekolah atau masuk suatu lembaga pendidikan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di segala bidang, terutama bidang Pendidikan. Saat ini masyarakat mungkin belum merasakan secara langsung manfaat pemungutan pajak untuk bidang pendidikan, sebab pemerintah baru membebaskan biaya sekolah pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Untuk tingkat perguruan tinggi bahkan terkesan pemerintah mau lepas tangan dari kewajibannya.

Diharapkan di masa depan pemerintah dapat mengupayakan peningkatan anggaran dengan melakukan upaya peningkatan efisiensi dalam sistem pendidikan, strukturisasi anggaran, dan prioritas alokasi anggaran yang memacu prestasi belajar siswa, sehingga pada akhirnya dapat dicapai peningkatan sumberdaya manusia Indonesia lewat pendidikan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi informasi berkembang sangat pesat. Dengan pengetahuan dan teknologi informasi yang terus berkembang, diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak dan membantu memenuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Oleh karena itu, peran penting pelajar sebagai generasi muda tersebut harus dibekali dengan sikap integritas yang tinggi, karena integritas saat ini merupakan hal yang sangat mendasar bagi mereka untuk melanjutkan pembangunan yang bermartabat. Integritas sudah menjadi isu penting saat ini, karena masalah integritas tidak hanya menjadi permasalahan di Direktorat Jenderal Pajak saja, tetapi di semua lini perpajakan seperti konsultan pajak, pemilik-pemilik perusahaan, para wajib pajak pun turut serta mendukung sikap integritas, bukan menjadi bagian dari para penghindar pajak. Generasi milenial juga merupakan terminologi generasi yang sekarang hangat dibahas di mana-mana, dan di tangan mereka lah diharapkan inklusi kesadaran pajak terwujud secara menyeluruh ke pelosok nusantara. Hal ini dapat terlihat dari upaya-upaya kami dalam mensosialisasikan kepada SMA Kristen Almasih, agar dapat membangun para pemuda dan pemudi dalam membantu penerimaan negara dengan memadukan ide-ide kreativitas serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun target yang ingin dicapai dalam aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan yaitu:

1. Siswa-siswi SMA Kristen Almasih memahami pendapatan dan pengeluaran Negara.
2. Siswa-siswi SMA Kristen Almasih dapat mengenal, memahami, dan mentransfer pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak sebagai keikutsertaan rakyat sebagai warganegara dalam membangun bangsa.
3. Para guru SMA Kristen Almasih agar dapat menambah pengetahuan dan dapat mentransfer pengetahuan bagi peserta didiknya.
4. Para dosen jurusan akuntansi FE Untar agar dapat melaksanakan pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2.2 Luaran Kegiatan

Target luaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah membuka wawasan siswa-siswi SMA Kristen Almasih untuk memahami kegunaan pajak bagi pembangunan bangsa. Sedangkan dari segi perguruan tinggi, luaran PKM dapat dipublikasikan di Senapenmas atau Research Week di lingkungan Universitas Tarumanagara.

No.	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Prosiding dalam Temu ilmiah seperti Research Week	Minimal draft

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-Langkah/ Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan ini dikemas dalam bentuk ceramah dan tanya jawab secara online dengan menggunakan zoom, serta penyebaran angket melalui google form untuk mendapat masukan dari peserta. Pada waktu sosialisasi dilakukan, seluruh peserta wajib menggunakan zoom dengan link yang akan diberikan dari team dosen.

Materi ceramah disajikan dalam bentuk *power point*. Sesi tanya jawab disediakan untuk memperjelas materi bahasan dan untuk mendapat masukan atas ketertarikan peserta penyuluhan pada peminatan studi lanjut di bidang akuntansi. Penyebaran angket dilakukan terkait dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini.

Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan penyuluhan ini dengan menyebarkan angket mengenai minat topik bahasan dan keberlanjutan kegiatan ini. Kegiatan ini akan dinilai berhasil (memberi dampak atau nilai tambah) jika dari hasil angket disinyalir bahwa banyaknya minat untuk keberlanjutan kegiatan semacam ini.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada :

Hari / tgl. : Jumat, 8 Oktober 2021

Waktu : Pk. 09.15 s/d 11.00 WIB

Dengan rincian sebagai berikut:

Pk.09.00 – 09.15 Registrasi

Pk.09.15 – 10.45 Sesi I – Pajak untuk Pembangunan Bangsa

Pk.10.45 – 11.00 Sesi Tanya Jawab.

Tempat : Google Meet

Pembicara : Nataherwin, SE,MM

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang dilaksanakan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Persiapan sosialisasi.

Dimana team dosen datang ke tempat mitra untuk membicarakan mengenai masalah atau hal-hal apa saja yang menjadi kendala mitra. Kami juga akan menentukan waktu dan aplikasi apa yang akan digunakan untuk penyuluhan ini.

2. Pertemuan untuk penyuluhan kepada siswa siswi dari team dosen

Di pertemuan ini kami akan memberikan pengetahuan mengenai:

a. Pengenalan pajak membahas mengenai:

- Pengertian pajak
- Fungsi pajak
- Jenis-jenis pajak
- Cara Membayar pajak
- Cara Melapor pajak
- Batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak

Penyuluhan Pajak untuk Pembangunan Bangsa Para dosen tersebut wajib melaksanakan pengabdian masyarakat dimana melalui kegiatan ini, dapat menjadi sarana bagi para dosen akuntansi pajak untuk berbagi pengetahuan. Keterkaitan materi yang dibahas dengan kompetensi sangat terlihat karena seluruh dosen yang terlibat dalam pengabdian masyarakat ini telah berpengalaman lebih dari sepuluh tahun dan aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta aktif sebagai penasehat akademik mahasiswa sehingga mampu mensinyalir beberapa pertanyaan yang umumnya diajukan oleh mahasiswa tentang pengenalan program studi S1 Akuntansi.

Kegiatan ini terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan kepada siswa-siswi SMA Kristen Almasih, agar dapat mengenal pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban sebagai warga negara. Penyuluhan semacam ini perlu dilakukan secara berkesinambungan agar selain memberikan pencerahan kepada siswa-siswi SMA sebagai calon mahasiswa, juga dapat menjadi ajang promosi dan dijalin silaturahmi antar para akuntan pendidik dengan calon peserta didiknya.

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Pihak sekolah membantu menyiapkan murid-murid yang akan mengikuti penyuluhan. Pihak sekolah menentukan tanggal dan waktu penyelenggaraan yang diusahakan pada jam sekolah. Pihak sekolah juga menentukan aplikasi daring yang digunakan untuk sarana penyampaian penyuluhan yang menggunakan google meet, karena siswa siswi serta guru-guru disekolah itu terbiasa dengan menggunakan google meet.

3.3 Kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Fakultas /Prodi	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Nataherwin	Lektor	Pajak	FE- Akuntansi	2 jam / minggu
2	Elyn Mareni			FE- Akuntansi	2 jam / minggu

BAB IV

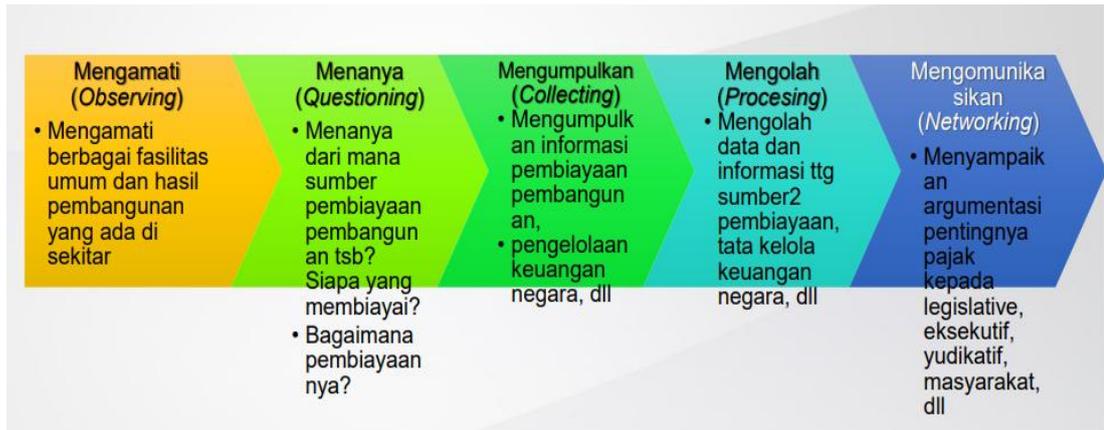
HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

4.1 Hasil Yang Dicapai

Pemberian pengetahuan perpajakan kepada calon wajib pajak khususnya siswa didik dirasakan perlu, karena asumsinya calon wajib pajak tersebut (siswa didik) dikemudian hari akan menjadi bagian dari masyarakat dan pasti akan melakukan aktivitas ekonomi. Siswa dan siswi sma ini merupakan generasi muda. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa, sehingga sangat perlu untuk mengetahui apa itu pajak, apa itu manfaat pajak. Karena masa depan bangsa ini ditentukan oleh generasi muda, karena suatu saat nanti kalian adalah calon wajib pajak atau pembayar pajak. Acara ini juga dilakukan untuk mengembangkan sikap sadar dan taat pajak, jadi apabila nilai-nilai kesadaran pajak sudah ditumbuhkan sejak dini kepada peserta didik melalui proses pembelajaran maka itu akan memudahkan pemerintah ke depannya.

Faktor pendukung pemberian pengetahuan perpajakan pertama adalah adanya kebijakan yang mengatur mengenai sosialisasi perpajakan bagi masyarakat. Menurut septiyani & putranti (2013) pendidikan dianggap sebagai salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan atau informasi mengenai hak dan kewajiban bagi siswa didik agar dapat hidup di tengah masyarakat, termasuk dalam hal ini pajak. Pajak sebagai salah satu komponen dalam pembangunan bangsa, dianggap perlu untuk diketahui oleh siswa didik, hal inilah yang melatarbelakangi adanya pelajaran perpajakan di sekolah menengah pertama.

Direktorat jenderal pajak mempunyai metode pembelajaran mengenai kesadaran pajak yang akan diterapkan di sistem pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa-siswa sma kristen almasih. Metode pembelajarannya dapat dilihat di gambar 2



Gambar 1. Model Pembelajaran Kesadaran Pajak

Berikut adalah topik bahasan dari kegiatan ini terdiri:

- Pajak dalam keseharian.
Bagian ini menjelaskan praktik pemungutan pajak dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan lain, memberikan informasi tentang penggolongan pajak menurut pemungutnya, membangun argumen pentingnya pajak bagi negara, menjelaskan fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend), serta yang terakhir mengomunikasikan data penerimaan pajak secara nasional.
- Konsep pajak.
Bagian ini menjelaskan konsep dan urgensi diperlukannya pajak dalam kehidupan manusia, alasan perlunya pajak dari berbagai aspek,
- Sejarah perpajakan Indonesia.
Bagian ini menjelaskan realitas pajak yang terjadi dari masa ke masa, pelaksanaan dan problem pajak yang dihadapi pada tiap masa, menjelaskan mengapa ada realitas pajak yang berbeda-beda pada tiap zaman.
- Fungsi pajak dalam pembangunan.
Bagian ini menjelaskan konsep pajak dalam pembangunan, konsep pembangunan dan alasan pentingnya pajak bagi pembangunan, landasan kewajiban membayar pajak, dan pentingnya kesadaran membayar pajak.
- Pajak sebagai perwujudan sila-sila Pancasila.
Bagian ini menggambarkan Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan penuntun penyelenggara negara dan warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Esensi materinya, meliputi: (1) konsep pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yang meliputi Sila Pertama dalam bentuk rasa syukur, sikap toleransi,

sikap kedermawanan, kerendahhatian, keikhlasan. Sila Kedua dalam nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Sila Ketiga dalam rasa memiliki, rasa cinta tanah air. Sila Keempat dalam sikap dialogis, komunikatif, musyawarah untuk mufakat. Sila Kelima dalam keadilan distributif, legalis, dan komutatif; (2) alasan mengapa pajak dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila; (3) sumber historis, sosio-politis tentang pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila; (4) argumen mengapa pajak dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila; dan (5) esensi dan urgensi pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Salah satu pendukung pokok terwujudnya kesejahteraan bangsa adalah pajak.

- Pajak sebagai perwujudan kewajiban warga Negara.

Bagian ini mendeskripsikan konsepsi kewajiban perpajakan yang dapat membangun kesadaran warga negara Indonesia membayar pajak. Esensi materi, meliputi: (1) konsep dan urgensi kewajiban perpajakan warga negara; (2) alasan mengapa pajak sebagai kewajiban warga negara; (3) sumber historis dan sosio-politis tentang kewajiban perpajakan warga negara; (4) argumen tentang dinamika dan tantangan pajak sebagai kewajiban warga negara; dan (5) esensi dan urgensi kewajiban perpajakan warga negara.

- Pengelolaan pajak.

Bagian ini mendeskripsikan tentang bagaimana negara mengelola pajak untuk pembiayaan negara. Esensi materi, meliputi: (1) lembaga pengelola pajak dan jenis pajaknya; (2) alasan mengapa negara yang mengelola pajak; (3) informasi tentang pengelolaan pajak oleh negara; (4) argumen tentang tantangan pengelolaan pajak oleh negara; dan (5) esensi dan urgensi pengelolaan pajak oleh negara.

- Prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan.

Bagian ini mendeskripsikan tentang prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan warga negara. Esensi materi pada bab ini meliputi: (1) konsep pemenuhan kewajiban perpajakan, meliputi daftar, hitung, bayar, dan lapor; (2) bagaimana cara pemenuhan kewajiban perpajakan; (3) cara pemenuhan kewajiban perpajakan; (4) argumen tentang pentingnya Wajib Pajak mengikuti prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan; dan (5) esensi dan urgensi pemenuhan kewajiban perpajakan.

- Penegakan hukum dalam perpajakan.

Bagian ini mendeskripsikan tentang prosedur penegakan hukum dalam pelaksanaan tindakan penagihan perpajakan. Esensi materi pada bab ini meliputi: (1) konsep

penegakan hukum perpajakan; (2) mengapa diperlukan penegakan hukum perpajakan; (3) tata cara penegakan hukum perpajakan; (4) argumen tentang pentingnya penegakan hukum perpajakan.

- Pajak dalam bela Negara.

Bagian ini menjelaskan konsep bela Negara, menjelaskan mengapa membayar pajak termasuk bela Negara, mendeskripsikan esensi dan urgensi bela Negara dengan membayar pajak.

Kegiatan ini akan menambah kesadaran masyarakat akan pajak akan membawa dampak positif yang tidak hanya ke pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat. Pemerintah membutuhkan pajak dari masyarakat sebagai sumber untuk memenuhi penerimaan anggarannya dan sebagai balasannya pada masyarakat, pemerintah memberikan beragam fasilitas umum, infrastruktur, subsidi, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kesadaran masyarakat akan pajak itu penting bagi pemerintah, dan juga masyarakat.

Pemberian edukasi pajak untuk anak SMA juga dalam rangka mempersiapkan mereka yang sebentar lagi akan menghadapi dunia kerja karena tidak semua lulusan SMA melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, banyak juga selepas lulus sekolah menengah langsung bekerja atau berwirausaha. Ketika mereka bekerja menerima penghasilan atau gaji, dan jumlahnya di atas PTKP ada kewajiban bagi mereka untuk lapor pajak. Keterlibatan sekolah juga dipilih untuk mengedukasi masyarakat bahwa urusan pajak itu bukan hanya urusan orang akuntan atau ekonomi, semua warga negara tidak melihat keilmuannya atau bidang kerjanya apa selama dia memperoleh penghasilan yang memenuhi kriteria akan menjadi wajib pajak dan memiliki kewajiban perpajakan, salah satunya lapor pajak. Melihat respon positif dari target, kegiatan ini tidak akan berhenti di sekolah ini saja, tetapi akan dilanjutkan secara berkala ke sekolah-sekolah lain, dan juga jenjang lain. Dengan rangkaian kegiatan ini diharapkan generasi muda Indonesia akan melek pajak sejak dini dan berdampak pada meningkatnya kesadaran pajak yang ujungnya kepatuhan pajak dan terciptanya penerimaan negara yang berkelanjutan (*sustainable*).

Jadwal kegiatan PKM ini adalah berikut:

No	Jenis Kegiatan	Minggu / Bulan (sesuaikan dengan kegiatan)				
		1	2	3	4	5
1	Kegiatan Survey 1	Agust 2021				
2	Kegiatan Survey 2			Agust 2021		
3	Persiapan				Agust 2021	
		Sept 2021	Sept 2021	Sept 2021	Sept 2021	
4	Pelaksanaan	Okt 2021	Okt 2021			
5	Penyelesaian			Nov 2021	Nov 2021	
		Des 2021	Des 2021			

4.2 Luaran Yang Dicapai

Mitra kami merasa bisa menambah wawasan siswa-siswi SMA Kristen Almasih memahami pentingnya pajak sebagai suatu wujud bela negara dan nantinya akan meningkat kepatuhan mereka. Sedangkan dari segi perguruan tinggi, luaran PKM sudah dipublikasikan di Senapenmas 2021 dengan id 101A di lingkungan Universitas Tarumanagara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dalam hal ini pas siswa dan siswi SMA serta para guru juga mendapatkan pengetahuan tambahan dalam mengenal, memahami, dan mentransfer pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak sebagai keikutsertaan rakyat sebagai warganegara dalam membangun bangsa. Serta memahami pendapatan dan pengeluaran Negara.

5.2 Saran

Penyuluhan semacam ini perlu dilakukan secara berkesinambungan agar selain membantu Siswa-siswi SMA sekolah lainnya agar semakin banyak siswa SMA dapat mengenal, memahami, dan mentransfer pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak sebagai keikutsertaan rakyat sebagai warganegara dalam membangun bangsa.

Daftar Pustaka

Kadarukmi, M.E. Retno. (2011). Peran Pajak Dalam Peningkatan Dunia Pendidikan. *Jurnal Administrasi Bisnis* (2011), Vol.7, No.2: hal. 171–178, (ISSN:0216–1249)

Kemenkeu. (2021). Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Diakses dari [informasi-apbn-2021.pdf \(kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-apbn-2021.pdf)

Ramadiansyah, D., Sudjana, N., & Dwiatmanto. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar pajak. *Jurnal E-Perpajakan*.

Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. In Buku 2.

Septiyani, Nuny & Titi M. Putranti, Titi M. (2013). Penguatan Pengetahuan Perpajakan Bagi Siswa Didik Menuju Voluntary Tax Compliance Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama Dan Sederajat Di Provinsi DKI Jakarta). FISIP UI

Siti, Masruroh, & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*.

[https://www.kompasiana.com/nabilahsaskia/5c29763aaeebe14af94539e8/peran-pajak-untuk-pembangunan-bangsa?page=all#:~:text=Pajak%20memiliki%20peran%20penting%20yang,juga%20sebagai%20alat%20pengatur%20\(regulerend\)](https://www.kompasiana.com/nabilahsaskia/5c29763aaeebe14af94539e8/peran-pajak-untuk-pembangunan-bangsa?page=all#:~:text=Pajak%20memiliki%20peran%20penting%20yang,juga%20sebagai%20alat%20pengatur%20(regulerend))

<https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasional>

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/pentingnya-pengetahuan-pajak-sejak-dini>

LAMPIRAN 1
Materi Yang Disampaikan pada saat Kegiatan PKM
(PPT)

UNTAR untuk INDONESIA

Pajak Sebagai Pembangunan Bangsa

7-8 Oktober 2021
NATAHERWIN

www.untar.ac.id | Untar Jakarta | @UntarJakarta | Bumitajakarta

I : Jasa Pajak Kepadamu

Tahukah kamu, begitu kamu lahir ke pangkuan bundamu— bahkan lama sebelum kamu lahir—pajak telah menjaga dan merawatmu?

Iya, karena semua anak Indonesia—termasuk kamu, tentu—mendapat pelbagai macam imunisasi dan layanan kesehatan lain di pusat kesehatan, posyandu, dan klinik yang biayanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, dari mana pemerintah mendapatkan uang untuk mengganti biaya itu? Jawabnya, dari pajak yang dibayar oleh warga negara yang cinta negeri ini.



KAMU SEHAT DAN KUAT BERKAT PAJAK

Puskesmas dan rumah sakit tersebar di seluruh negeri, memberikan layanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Saat kamu masih di rahim ibumu, ibumu rajin ke Puskesmas, memastikan kamu sehat dan lahir dengan selamat. Semua dengan biaya perawatan yang murah buat ibumu, sebab sebagian biaya perawatan, obat-obatan, dan jasa dokter ditanggung oleh pemerintah. Tanpa pajak, pemerintah tidak akan sanggup menanggung itu semua.



KARENA PAJAK, SEKOLAH MURAH

Dengan uang pajak, pemerintah membangun gedung-gedung sekolah, membagikan buku teks pelajaran ke sekolah-sekolah, dan menyediakan sarana belajar lainnya supaya kamu dan teman-temanmu di seluruh Indonesia bisa belajar dengan baik untuk masa depanmu dan masa depan bangsa ini.



PEMBANGUNAN BERJALAN KARENA PAJAK

- Jalan beraspal, jembatan, terminal, pasar, yang kamu lalui saat berangkat sekolah, dibangun dari pajak. Juga lampu jalan, halte, dan taman, tempat kamu janji-janji dan berkumpul bersama kawan-kawan.
- Saat berkunjung ke rumah kakek dan nenek di kampung, atau bertamasya ke kota, atau menghadiri pernikahan saudaramu diluar pulau, kamu tentu melewati bandar udara atau pelabuhan. Pernahkah kamu mendengar berita berapa besar dana yang harus dikeluarkan untuk membangun sebuah bandar udara?
- Yang jelas, dana yang diperlukan untuk membangun bandar udara, pelabuhan, jalan beraspal, dan sebagainya itu besar sekali. Karena dana yang diperlukan amat besar, hanya pemerintah yang sanggup membangunnya. Ya, siapa lagi yang mampu membangun semua itu kalau bukan pemerintah? Tapi, lagi-lagi, pemerintah bisa membangun semua itu juga berkat pajak yang dikumpulkan dari rakyatnya.



ADA PAJAK, ADA SUBSIDSI

- Berkat pajak, pemerintah dapat membantu rakyatnya untuk membeli BBM bersubsidi. Hasilnya, ke mana-mana kamu bisa naik angkutan umum, termasuk kereta api dan kapal laut, dengan tarif yang murah. Aneka makanan di kantin sekolah dan di tukang gorengan terus terbeli dengan uang sakumu. Itu karena para pedagang makanan menggunakan LPG tabung 3 kg yang murah; sebagian harganya ditanggung pemerintah.
- Harga bahan makanan pokok kita seperti beras dan palawija akan sangat tinggi kalau pemerintah tidak membantu Pak Tani mendapat pupuk dan benih. Pemerintah juga membantu rakyatnya menikmati aliran listrik dengan tarif terjangkau, di samping menyediakan fasilitas penerangan jalan dan tempat-tempat umum.



ADA PAJAK, ADA SUBSIDI

- Dengan sedikit menghemat uang saku, tidak perlu uang banyak, kamu tetap bisa segera berkunjung ke kebun binatang, museum, dan tempat wisata lainnya. Taman-taman kota yang terawat rapi, tempat kamu berolahraga atau sekadar kumpul-kumpul untuk mengerjakan tugas sekolah, atau bermain, malah bisa kamu datangi dengan gratis. Itu semua berkat pajak.
- Tanpa pajak, pemerintah tidak bisa membayar petugas kebersihan yang merawat dan menyiram tanaman dan bunga-bunga di taman. Kalau rakyatnya enggan membayar pajak, pemerintah tidak akan mampu menggaji dokter dan pekerja di kebun binatang.
- Bila itu terjadi, siapa yang akan menolong satwa-satwa lucu itu saat mereka sakit? Siapa yang tiap hari akan memberikan mereka makanan?



ADA PAJAK, KAMU AMAN

- Dengan pajak, negara kita memperkuat diri dengan tentara dan polisi. Dengan uang pajak kita membeli pesawat tempur, kapal perang, kendaraan lapis baja, dan aneka rupa senjata modern. Dari uang pajak juga pemerintah menggaji tentara yang bekerja mempertahankan negara kita dari ancaman negara lain. Dengan uang pajak, pemerintah menggaji Pak Polisi untuk menjaga ketertiban, mencegah orang berbuat jahat, atau menangkap pelaku kejahatan. Berkat uang pajaklah kamu bisa belajar, bergajian dengan kendaraan umum, bercengkerama di rumah, di taman, di sekolah, di mal, dan lainnya dengan rasa aman tanpa was-was.
- Hmm, sampai di sini, kamu paham, kan, pentingnya pajak?
- Penasaran, kan, pajak itu apa, dari mana sumbernya, dan ke mana saja mengalirnya?



2 : Pajak Itu Apa sih?

Kalau kamu ingin gabung ke sebuah klub, biasanya kamu wajib membayar iuran yang jumlahnya telah disepakati oleh semua anggota. Dengan iuran itu, klub kamu bisa membuat aneka kegiatan bermanfaat. Misalnya, iuran itu dipakai untuk menyewa lapangan futsal untuk olahraga di luar jam sekolah, menyumbang teman yang terkena musibah, atau mungkin sekali-sekali iuran itu dipakai untuk makan bersama.

- Nah, negara kita ini bisa diibaratkan sebagai sebuah klub besar. Agar klub besar ini tetap eksis dan terus mengadakan berbagai kegiatan yang bermanfaat, semua anggota klub yang punya pekerjaan dan sejumlah penghasilan tertentu pun harus bayar iuran. Nah, di lingkup negara, iuran yang wajib disetor ke kas negara dan dipakai untuk kesejahteraan bersama itulah yang disebut **pajak**.
- Anggota masyarakat yang dikenai kewajiban perpajakan ini oleh undang-undang disebut sebagai **Wajib Pajak**.



PAJAK ITU APA SIH?

- Besarnya pajak yang harus dibayar, apa saja yang dikenai pajak, dan siapa saja yang wajib membayar pajak juga ditentukan berdasarkan kesepakatan kita semua.
- Karena pajak begitu penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara kita, maka aturan perpajakan dituangkan dalam undang-undang.
- Kita setidaknya mengenal Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang populer disebut UU KUP. Kita juga mengenal Undang-Undang Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU tentang Pajak Bumi dan Bangunan, UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan UU Bea Meterai.

Bagaimana dengan warga negara yang tidak mampu membayar pajak?

Nah, itulah adilnya pajak. Pajak itu hanya diwajibkan kepada yang mampu membayar. Orang yang tidak atau belum memiliki pekerjaan, atau telah punya pekerjaan tapi mendapat imbalan uang yang kecil saja, tidak akan dikenai pajak. Bahkan pemerintah membantu mereka melalui pelbagai program bantuan. Mereka juga tidak dilarang untuk ikut menikmati hasil pembangunan dan fasilitas umum yang dibangun dari uang pajak.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

- Secara berkala, pemerintah menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang disingkat PTKP. PTKP adalah besarnya penghasilan yang menjadi batas apakah seseorang itu sudah wajib membayar pajak atau belum. Besarnya PTKP ditetapkan dengan memerhatikan kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kalau kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup menurun, pemerintah akan membantu mereka dengan menaikkan PTKP.

Status Kena Wajib Pajak	Jumlah per Tahun	Jumlah per Bulan
Pribadi	Rp4.000.000	Rp3375.000
Kawin (tanpa tanggungan)	Rp4.500.000	Rp3750.000
Setiap anggota keluarga sedarah dan dalam garis keturunan lurus (tanggungan) maksimal 3 orang	Rp4.500.000	Rp3750.000

Tarif Pajak

- Selain menetapkan PTKP, pemerintah juga mengatur besarnya tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan besarnya penghasilan mereka. Semakin tinggi penghasilan WP, semakin besar bagian atau proporsi pajak yang harus dibayarnya. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarif yang akan dikenakan. Inilah yang disebut pengenaan pajak secara **progresif**.

Lapisan PKP	Tarif Pajak
s.d. Rp50.000.000,00	5 %
Diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15 %
Diatas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25 %
Diatas Rp500.000.000,00	30 %

- Untuk memudahkan kita melihat bagaimana tarif pajak itu diterapkan, gambarkan atau bayangkan sebuah ember yang ditandai dengan lapisan penghasilan dan tarif pajak. Bagi ember itu menjadi empat lapis dengan menarik garis mendatar. Garis ini akan menandai batas antar lapisan. Lapisan terbawah adalah lapisan yang memuat penghasilan sampai dengan Rp 50 juta dengan tarif 5 persen, lapisan di atasnya adalah lapisan untuk penghasilan di atas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta dengan tarif 15 persen, begitu seterusnya.



Joko, seorang lajang yang tidak punya tanggungan memiliki penghasilan sebesar Rp 6,5 juta per bulan, bagaimana tarif PPh akan dikenakan kepadanya?

Kalau kita hitung per tahun, penghasilan Joko pun harus kita setahunkan, yakni Rp 6,5 juta kali 12 bulan, didapatlah Rp 78 juta.

Sekarang, kita tuang penghasilan Joko ke dalam ember. Karena lapisan pertama ember hanya cukup untuk menampung penghasilan hingga Rp 50 juta, maka hanya Rp 50 juta dari penghasilan Joko itu yang bisa kita tuang ke lapisan pertama ini. Lapisan ini bertarif 5 persen. Nah, berarti Joko masih punya sisa penghasilan sebesar Rp 28 juta. Maka Rp 28 juta ini harus kita tuang ke lapisan di atasnya, yaitu lapisan yang bertarif 15 persen. Maka besarnya kewajiban pajak Joko dapat dihitung begini.

$$\begin{aligned}
 \text{Rp } 50.000.000 \times 5 \text{ persen} &= \text{Rp } 2.500.000 \\
 \text{Rp } 28.000.000 \times 15 \text{ persen} &= \text{Rp } 4.200.000 \\
 \text{Jumlah PPh terutang} &= \text{Rp } 6.700.000
 \end{aligned}$$

3 : Pajak Wujud Bela Negara



- Jangan sampai kalian lupa yang satu ini—bayar pajak. Iya, bayar pajak adalah cara paling sederhana dan paling nyata yang bisa dilakukan oleh tiap warga negara yang ingin membela negaranya. Di balik tiap negara yang kuat, pasti ada warga negara yang taat pajak.
- Bayangkan, tanpa pajak, dengan apa negara ini membangun dan menyejahterakan rakyatnya? Dengan apa pemerintah membentengi diri dari ancaman negara lain?
- Dengan uang pajaklah juga kita membangun. Dengan uang pajaklah kita membeli pesawat tempur, kapal perang, kendaraan berlapis baja, dan persenjataan canggih. Dari uang pajak jugalah pemerintah menggaji tentara yang bekerja mempertahankan kedaulatan negara.

4: Pajak, Dulu dan Kini

Pajak sudah ada sejak negara kita masih berupa kerajaan-kerajaan yang tersebar di berbagai wilayah dan pulau. Tiap tahun rakyat diwajibkan menyerahkan sebagian harta dan hasil bumi mereka kepada raja. Perupetian ini terus berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda. Sistem pemungutan harta dan hasil bumi ini kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah RI. Hanya saja namanya bukan upeti lagi, melainkan pajak.

Pajak dulu

- Pemerintah RI menugaskan aparat pajak untuk menerapkan *official assessment system*, yaitu negara atau pemerintah menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak tiap tahun.
- Hingga akhir tahun 1980-an, pemerintah Indonesia belum menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara.
- Negara pun membiayai pembangunan dengan mengandalkan keuntungan dari ekspor minyak itu.
- Oleh sebab itulah, pada tahun 1983, pemerintah meluncurkan "revolusi pajak" yang ditandai dengan perubahan dari sistem *official assessment* menjadi *self-assessment*.

Pajak kini

- Mulai 1984, sistem pemungutan ini berubah. Kini, tiap WP (Wajib Pajak) diberi kepercayaan oleh negara untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang wajib ia bayar. Sedangkan pengawasannya diserahkan kepada pemerintah. Inilah yang disebut *self-assessment system*.
- Mulai 1984, diperkenalkanlah adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemanfaatan teknologi informasi perpajakan, dan sebagainya. Akhirnya, sejak 1983 itu, penerimaan pajak di negara kita sudah bisa melebihi penerimaan dari minyak dan gas.
- Terbuktilah bahwa pajak dalam sumber utama yang dapat dijadikan andalan pembiayaan pembangunan.

5: Bagaimana Pajak Dicatat dan Disalurkan?

Ada pajak yang diadministrasikan atau dicatat oleh pemerintah pusat, ada pula pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kota/kabupaten).

Instansi pemerintah pusat yang bertugas mengadministrasikan pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan instansi pemerintah daerah yang bertugas mengadministrasikan pajak biasanya disebut Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Jenis pajak Pusat

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan Barang yang tergolong Mewah (PPnBM)
4. Bea Materai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan

Jenis Pajak Daerah

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan,
- Pajak Kendaraan Bermotor,
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- Pajak Rokok,
- Pajak Hotel,
- Pajak Restoran,
- Pajak Hiburan,
- Pajak Reklame,
- dll

6 : Uang Pajak Mengalir Ke Mana?

- Setiap tahun, pajak yang diadministrasikan oleh DJP akan menjadi komponen utama pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Jadi, kalau kamu mau tahu, ke mana saja uang pajak itu disalurkan dan berapa besarnya, kamu bisa melihatnya di APBN. Di sana akan terbaca berapa besarnya dana yang tersalurkan kepada masyarakat melalui berbagai Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah.
- Penerimaan perpajakan terus menjadi tulang punggung pendapatan negara. Lebih dari 70 persen pendapatan yang diterima negara adalah pendapatan yang berasal dari pajak.



LAMPIRAN 2

Foto-Foto

Zoom Meeting Recording

Tarif Pajak

- Selain menetapkan PTKP, pemerintah juga mengatur besarnya tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan besarnya penghasilan mereka. Semakin tinggi penghasilan WP, semakin besar bagian atau proporsi pajak yang harus dibayarnya. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarif yang akan dikenakan. Inilah yang disebut pengenaan pajak secara **progresif**.

Lapisan PKP	Tarif Pajak
s.d. Rp50.000.000,00	5 %
Diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15 %
Diatas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25 %
Diatas Rp500.000.000,00	30 %

14

Windows taskbar: Type here to search, 29°C, 8:30 AM 10/8/2021

Zoom Meeting Participants: Nataherwin, Elyn_Untar, Ferry Lubis PKN, Vera Monic

Zoom Meeting Recording

7 : Siapa yang harus Bayar Pajak?

Pada dasarnya semua orang—baik dia WNI maupun WNA— yang tinggal di Indonesia wajib bayar pajak. Demikian juga dengan tiap badan usaha (perusahaan) yang didirikan atau yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia—mereka juga wajib bayar pajak.

Undang-undang menyebut semua yang wajib membayar pajak ini sebagai Wajib Pajak (WP). Undang-undang ini juga membagi WP menjadi dua, yaitu Orang Pribadi (OP) dan Badan.

Zoom Meeting Participants: Nataherwin, Elyn_Untar, Ferry Lubis PKN, Vera Monic, Vanessa_Untar, Anastasya_Untar, Ivanna T, Ibu Elsyia

Chat:

- Nicholas to Everyone: pak sorry mau nanya jadi klo yang pak joko itu termasuk di atas 5 persen donk
- Nataherwin to Everyone: ya bro..jadi kena pajak 5% dan 15%.jd semuanya itu dihitung dari 5% dulu.
- Nicholas to Everyone: ok Pak Terima kasih
- Nataherwin to Everyone: sami sami bro

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Windows taskbar: Type here to search, 29°C, 8:50 AM 10/8/2021

LAMPIRAN 3

Luaran Wajib

PENGETAHUAN PAJAK KEPADA SISWA-SISWI SMA KRISTEN ALMASIH

Nataherwin¹, dan Elyn Mareni²

¹Jurusan Akuntansi , Universitas Tarumanagara Jakarta

Surel: nataherwin@fe.untar.ac.id

²Jurusan Akuntansi , Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: elynmareni@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this community service is to fulfill the activities of tridharma college and to help provide knowledge to students and students as the young generation of the nation to provide an introduction to taxes in addition, this activity is to provide tax knowledge and must be fostered a conscious and tax-abiding attitude from an early age, because the obligation to pay taxes is one form of state defense to Almasih Christian high school students to be given. In addition to helping one of the programs of the Directorate General of Taxes, namely The Speaking Tax which aims to provide an introduction to taxes to early childhood because they are the younger generation of this nation. Our partner is a high school in Jakarta. For the first time we will provide counseling in the form of lectures to high school students to be given direct tax knowledge that is heavy and formal, and must be fun but still educating, here we focus on explaining the tax benefits that they can feel early on. The high school students were very enthusiastic in participating in this event and ended the Q&A section. This series of activities is expected to invite young Indonesians to become more tax conscious and increase tax compliance in the future he has earned income. The younger generation is also invited to participate in the defense of the State through tax compliance.

Keywords: Tax Knowledge, High School Student

ABSTRAK

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memenuhi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan untuk membantu memberikan pengetahuan kepada siswa dan siswi sebagai generasi muda bangsa untuk memberikan pengenalan tentang pajak Selain itu kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan perpajakan serta harus dipupuk sikap sadar dan taat pajak sedari dini, karena kewajiban membayar pajak merupakan salah satu bentuk bela Negara kepada siswa-siswi SMA Kristen Almasih untuk diberikan. Selain untuk membantu salah satu program Direktorat Jenderal Pajak yaitu Pajak Bertutur yang bertujuan untuk memberikan pengenalan tentang pajak kepada anak-anak usia dini karena merekalah generasi muda bangsa ini. Mitra kami adalah suatu sekolah SMA di Jakarta. Untuk pertamanya kita akan memberikan penyuluhan dalam bentuk ceramah kepada para siswa-siswi SMA untuk diberi pengetahuan pajak yang langsung berat dan bersifat formal, serta harus bersifat fun tapi tetap mengedukasi, disini kita berfokus pada penjelasan manfaat pajak yang bisa dirasakan mereka sejak dini. Para siswa siswi SMA sangat antusias dalam mengikuti acara ini dan diakhiri seksi tanya jawab. Serangkaian kegiatan ini diharapkan dapat mengajak anak muda Indonesia semakin sadar pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak pada nanti dia sudah mendapatkan penghasilan. Generasi muda juga diajak untuk ikut bagian dalam bela Negara melalui kepatuhan pajak.

Kata kunci: Pengetahuan pajak, Siswa SMA

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang utama sejak dari jaman dahulu. Pajak disini juga memiliki tujuan menyejahterahkan rakyatnya dengan melalui pembangunan jalan dan sarana publik. Berdasarkan Undang-Undang, bahwa pajak

adalah iuran yang dibayarkan rakyat kepada Negara dan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung, tetapi digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Sebagai sumber utama pendapatan Negara yang paling besar, maka pajak mempunyai peranan yang sangat penting. Pendapatan pajak dapat terlihat bahwa penerimaan pajak hingga bulan April 2021 sebesar Rp374,9 triliun. Pencapaian tersebut 30,94% dari total penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. (kemenkeu, 2021).

Pendapatan pajak juga digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional agar dapat berjalan dengan baik serta dapat mensejahterahkan rakyat Indonesia. Dalam masa-masa sekarang ini, dalam praktiknya perusahaan akan cenderung meminimalkan berbagai biaya yang keluar terutama beban pajak. Wajib pajak yang paling banyak memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan pajak adalah perusahaan, tetapi tidak sedikit perusahaan yang berpikir pajak itu sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan atau laba mereka.

Resmi (2013) mengemukakan ada dua fungsi pajak yang paling penting yaitu (1) Sebagai sumber dana pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membiayai pembangunan lewat APBN dan APBD; (2) Sebagai alat yang mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Selain itu pajak juga mempunyai fungsi *budgetair* dimana pajak sebagai anggaran yang digunakan untuk memasukan dana kedalam kas Negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pajak juga mempunyai fungsi *regulerend* dimana pajak sebagai alat pengatur. Pajak juga sebagai alat stabilitas redistribusi dalam perdagangan yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur Negara.

Untuk menjalankan Pemulihan Ekonomi Nasional di masa pandemi ini, pemerintah sendiri memerlukan dana, dan disanalah pajak diperlukan sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran selama pandemi ini. Oleh karena itu, kita sebagai Wajib Pajak harus memiliki kesadaran pajak yang tinggi, karena penerimaan negara tersebut tergantung dengan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Pemahaman tentang peraturan pajak sangat penting untuk semua masyarakat, karena akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak yang baik. Hasil penelitian Siti & Zulaikha (2013) juga menjelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan taat.

Di masa kini, kebutuhan akan pengetahuan perpajakan sangatlah diperlukan bagi semua wajib pajak baik wajib pajak Badan maupun wajib pajak orang pribadi. Dengan berkembangnya dunia usaha saat ini, Dirjen Pajak dalam rangka mengumpulkan dana untuk pembangunan dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi wajib pajak yang patuh, sadar dan berdedikasi, maka dikeluarkannya berbagai Peraturan perpajakan baru.

Banyak orang yang kalau mendengar kata-kata membayar pajak bisa membuat pusing atau sengaja menghindarinya. Hal tersebut terjadi karena pajak bagi sebagian orang berkesan rumit dan juga membingungkan, serta sering merasa keberatan untuk mengurangi pendapatan mereka demi membayar pajak. Orang sering kali tidak berpikir

bahwa selama ini kenikmatan menggunakan jalan raya, jembatan, penerangan jalan, taman dan fasilitas lainnya bukan berasal dari pajak yang dibayarkan mereka.

Pada tahun 2021 ini, direktorat jenderal pajak membuat suatu program pajak bertutur. Pajak bertutur virtual tahun ini mengusung tema “generasi muda sadar pajak, wujud bela negara”. Setiap tahunnya kegiatan ini dilaksanakan oleh semua lini di direktorat jenderal pajak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pajak untuk generasi muda yaitu para pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP, SMA dan mahasiswa perguruan tinggi. Karena generasi muda inilah sebagai calon wajib pajak nantinya yang akan menjalankan kewajiban perpajakannya. Tahun ini, topik yang dipilih adalah tentang pemanfaatan pajak sebagai sumber dana dalam penanganan pandemi COVID-19, dimana dana pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengadaan vaksin dan bantuan sosial masyarakat.

Siswa-siswi SMA Kristen Almasih sebagai lulusan yang akan terjun ke dunia kerja maupun usaha maka sudah selayaknya diberikan penyuluhan mengenai kewajiban membayar pajak sebagai warga negara yang baik agar memiliki wawasan yang lebih luas. Hal ini juga yang dirasakan oleh Kepala Sekolah dalam rangka membekali para siswa-siswi SMA Kristen Almasih untuk diberikan pengetahuan perpajakan agar dapat memupuk rasa bela Negara dengan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak dan sikap taat pajak sedari dini. Oleh karena permasalahan diatas serta untuk mendukung program pemerintah yaitu “Pajak Bertutur”, maka kami akan melakukan pengabdian masyarakat dalam memberikan pengetahuan perpajakan kepada siswa-siswi SMA Kristen Almasih.

2. Metode pelaksanaan

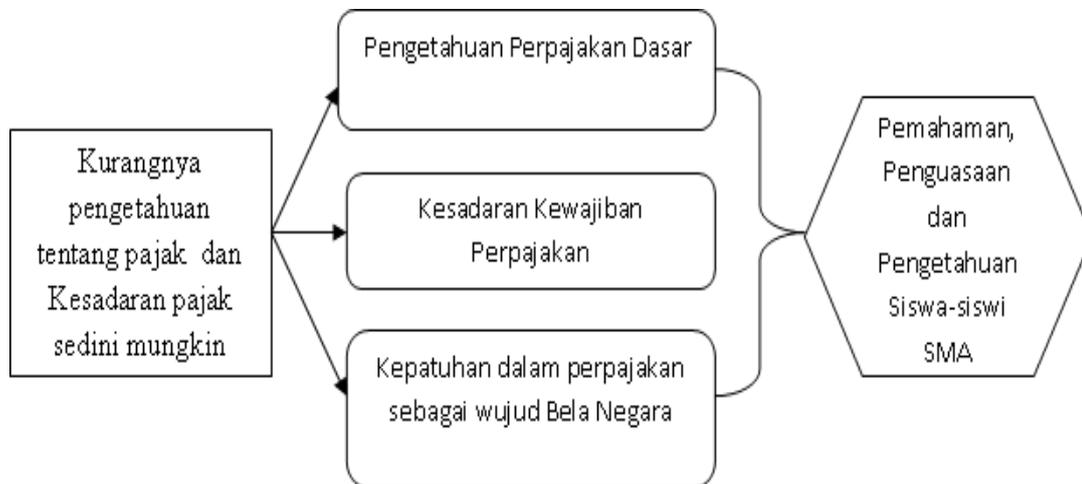
Kegiatan penyuluhan ini dikemas dalam bentuk ceramah dan tanya jawab secara online dengan menggunakan zoom, serta penyebaran angket melalui google form untuk mendapat masukan dari peserta. Pada waktu sosialisasi dilakukan, seluruh peserta wajib menggunakan zoom dengan link yang dibuat dari team dosen.

Materi ceramah disajikan dalam bentuk *power point*. Sesi tanya jawab disediakan untuk memperjelas materi bahasan. Untuk mengevaluasi tingkat pemahaman materi yang dipaparkan, maka kami mengadakan kuis untuk seluruh peserta di sesi terakhir. Untuk siapa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat akan diberikan hadiah kepada lima orang siswa. Sedangkan untuk mendapat masukan atas ketertarikan peserta penyuluhan pada peminatan studi lanjut di bidang akuntansi. Penyebaran angket dilakukan terkait dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini.

Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan penyuluhan ini dengan menyebarkan angket mengenai minat topik bahasan dan keberlanjutan kegiatan ini. Kegiatan ini akan dinilai berhasil (memberi dampak atau nilai tambah) jika dari hasil angket disinyalir bahwa banyaknya minat untuk keberlanjutan kegiatan semacam ini.

Kegiatan pengabdian ini yang dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu persiapan sosialisasi dan pertemuan untuk penyuluhan kepada siswa siswi dari team dosen. Untuk persiapan sosialisasi Dimana team dosen datang ke tempat mitra untuk membicarakan mengenai masalah atau hal-hal apa saja yang menjadi kendala mitra. Kami juga akan

menentukan waktu dan aplikasi apa yang akan digunakan untuk penyuluhan ini. Sedangkan pertemuan untuk penyuluhan kepada siswa siswi dari team dosen, kami akan memberikan pengetahuan mengenai pengenalan pajak. Berikut adalah gambaran iptek yang akan ditransfer ke mitra.



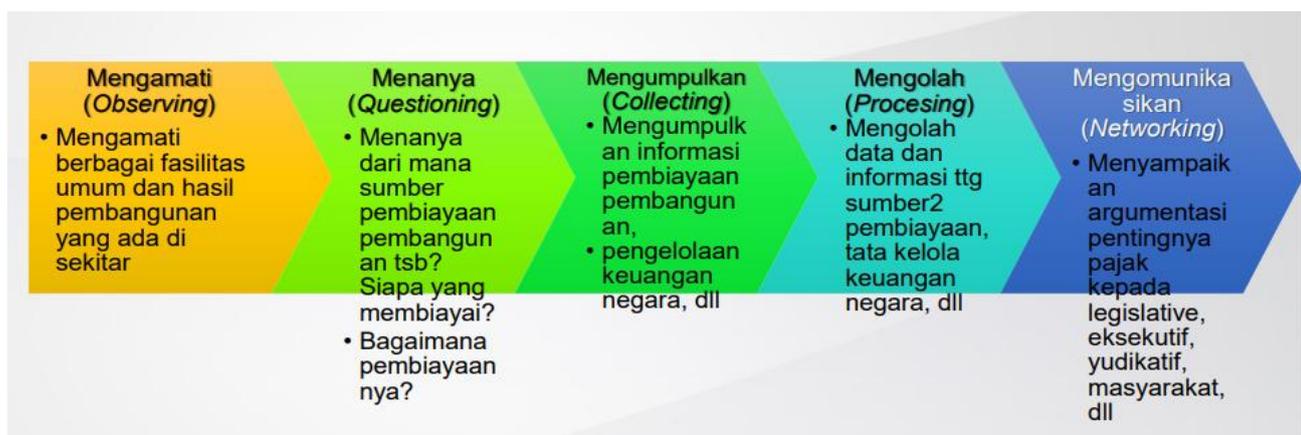
Gambar 1. Model yang ditransfer kepada mitra

3. Hasil dan pembahasan

Siswa SMA Almasih sebagai siswa didik dan calon wajib pajak dimasa mendatang merasakan perlu untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih yang belum di dapat selama di sekolah khususnya pengetahuan perpajakan. Siswa sma sadar akan kedepannya bahwa mereka akan menjadi bagian dari masyarakat dan akan melaksanakan aktivitas ekonomi baik dengan bekerja atau menjadi pengusaha. Siswa sma almasih sebagai generasi penerus bangsa perlu mengetahui apa itu pajak, kenapa kita perlu membayar pajak, pajak apa saja yang perlu kita bayar dan beserta manfaatnya. Acara ini dibuat untuk mengembangkan secara dini sikap sadar dan kepatuhan dalam membayar pajak. Acara ini juga merupakan suatu proses belajar bagi setiap siswa sma almasih dan membantu pemerintah di masa mendatang.

Septiyani & Putranti (2013) menjelaskan bahwa pendidikan sebagai salah satu faktor yang utama dalam upaya memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban perpajakan mereka sebagai warga negara yang baik, dalam hal ini warga negara yang dimaksud adalah siswa SMA yang nantinya hidup bermasyarakat. Dengan membuat acara sosialisasi perpajakan dapat membantu kebijakan dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Para siswa memang sudah mendapatkan pengetahuan pajak melalui pelajaran dari tingkat SMP tetapi pengetahuan yang diberikan hanya sedikit karena banyak dari para guru juga kurang mengetahui secara detail mengenai perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai metode pembelajaran mengenai kesadaran pajak yang akan diterapkan di sistem pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa-siswa SMA Kristen Almasih. Metode pembelajarannya dapat dilihat di gambar 2



Gambar 2. Model Pembelajaran Kesadaran Pajak

Berikut adalah topik bahasan dari kegiatan ini terdiri:

- Pajak dalam kehidupan sehari-hari
Bagian ini menjelaskan praktik pemungutan pajak dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan lain, memberikan informasi tentang penggolongan pajak menurut pemungutnya, membangun argumen pentingnya pajak bagi negara, menjelaskan fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend), serta yang terakhir mengomunikasikan data penerimaan pajak secara nasional.
- Konsep pajak.
Bagian ini menjelaskan konsep dan urgensi diperlukannya pajak dalam kehidupan manusia, alasan perlunya pajak dari berbagai aspek,
- Sejarah perpajakan Indonesia.
Bagian ini menjelaskan realitas pajak yang terjadi dari masa ke masa, pelaksanaan dan problem pajak yang dihadapi pada tiap masa, menjelaskan mengapa ada realitas pajak yang berbeda-beda pada tiap zaman.
- Fungsi pajak dalam pembangunan.
Bagian ini menjelaskan konsep pajak dalam pembangunan, konsep pembangunan dan alasan pentingnya pajak bagi pembangunan, landasan kewajiban membayar pajak, dan pentingnya kesadaran membayar pajak.
- Pajak sebagai perwujudan sila-sila Pancasila.
Bagian ini menjelaskan Pancasila sebagai ideologi Negara yang menjadi penuntun dalam penyelenggaraan Negara dan warga Negara untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Berikut materinya meliputi konsep pajak sebagai perwujudan nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila ke lima, menjelaskan mengapa nilai-nilai Pancasila dihubungkan dengan pajak, menjelaskan tentang pajak sebagai perwujudan nilai Pancasila, menjaskan esensi dan urgensi pajak sebagai sebagai perwujudan nilai Pancasila dan menjelaskan bahwa kesejahteraan bangsa terwujud lewat pajak. Nilai-nilai Pancasila yang diajarkan yaitu Sila Pertama dalam bentuk rasa syukur, sikap toleransi, sikap kedermawanan, kerendahhatian, keikhlasan. Sila Kedua dalam nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Sila Ketiga dalam rasa memiliki, rasa cinta tanah air. Sila Keempat dalam sikap dialogis, komunikatif, musyawarah untuk mufakat. Sila Kelima dalam keadilan distributif, legalis, dan komutatif.
- Pajak sebagai perwujudan kewajiban warga negara.

Bagian ini menjelaskan konsep dasar kewajiban perpajakan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kesadaran warga negara Indonesia untuk membayar pajak. Materi yang dijelaskan meliputi kewajiban perpajakan warga Negara sebagai suatu konsep dan sesuatu yang mendesak, menjelaskan alasan pajak sebagai suatu kewajiban bagi warga Negara, menjelaskan sejarah tentang kewajiban perpajakan bagi warga Negara, tantangan serta dinamika pajak.

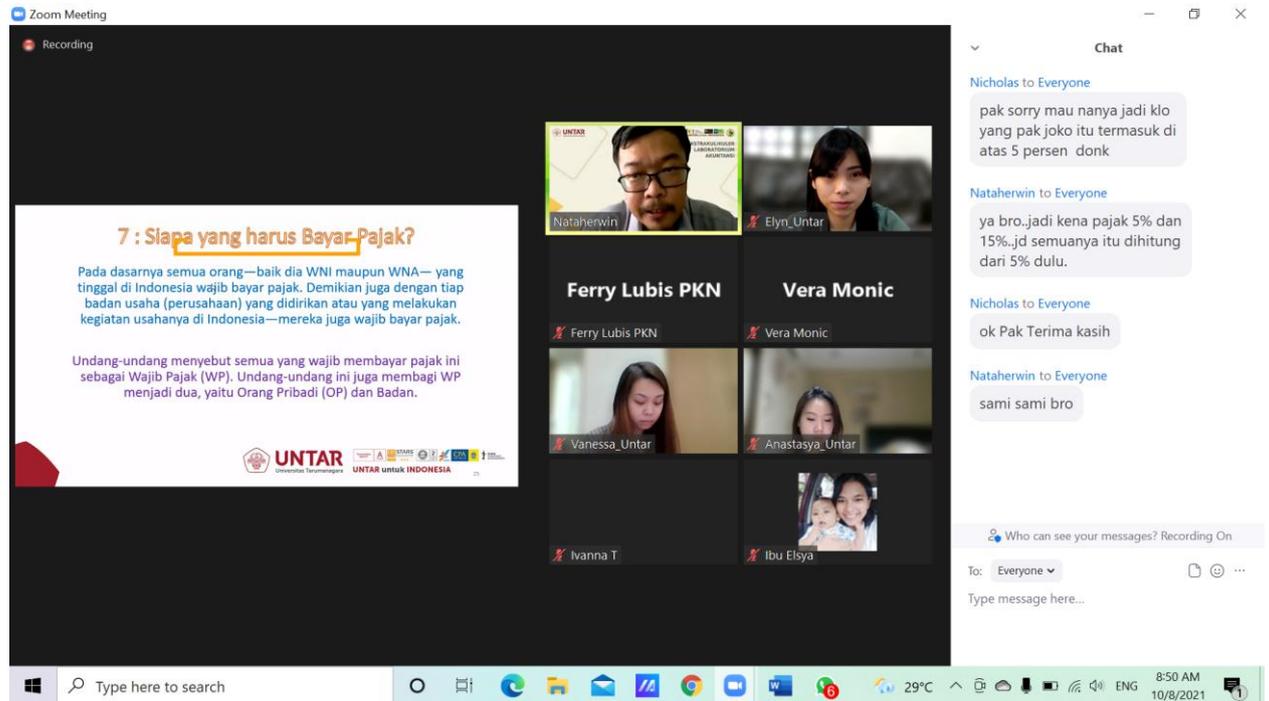
- Pengelolaan pajak.
Bagian ini menjelaskan tentang cara Negara mengelola pajak sebagai sumber pembiayaan Negara. Materi yang dijelaskan meliputi lembaga yang mengelola pajak serta jenis pajaknya, menjelaskan mengapa Negara melakukan pengelolaan pajak, cara Negara mengelola pajak, dan menjelaskan urgensi dan esensi Negara dalam mengelola pajak.
- Cara memenuhi kewajiban perpajakan.
Bagian ini menjelaskan tentang cara warga Negara dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Materi yang dibahas adalah cara memenuhi kewajiban perpajakan dengan memberikan informasi cara menghitung, membayar dan melapor pajak serta membuat SPT.
- Penegakan hukum dalam perpajakan.
Bagian ini menjelaskan tentang pelaksanaan tindakan penagihan pajak. Materi ini menjelaskan mengapa perlu penegakan hukum pajak, menjelaskan bagaimana cara menegakkan hukum dan menjelaskan konsep serta alasan pentingnya penegakan hukum pajak ini.
- Pajak dalam bela Negara.
Bagian ini menjelaskan konsep bela Negara, menjelaskan mengapa kalau membayar pajak merupakan suatu wujud bela Negara dan serta menjelaskan prinsip bela Negara lewat kepatuhan membayar pajak.

Kegiatan ini diharapkan akan menambah kesadaran para siswa SMA dalam mematuhi perpajakan dan serta membawa dampak positif ke semua elemen baik itu pemerintahan dan masyarakat. Para siswa SMA Kristen Almasih dan para guru sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena bukan hanya untuk menambah ilmu tetapi membuat mereka untuk mengerti pajak secara lebih dalam dan membuat mereka lebih sadar bahwa membayar pajak itu penting untuk negara. Pemberian edukasi pajak untuk anak SMA juga dibuat untuk mempersiapkan mereka sebagai generasi penerus yang nantinya akan masuk dunia kerja dan mungkin berwirausaha, karena tidak semua lulusan SMA memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ketika mereka sudah berkerja mendapatkan penghasilan atau memulai suatu usaha, maka kewajiban mereka juga dimulai dengan membayar dan melaporkan pajak.

Sekolah Kristen Almasih memilih ikut terlibat dalam mengedukasi siswa didiknya dengan ilmu pajak agar siswa didiknya bisa menjadi warga negara yang baik lewat kesadaran dalam membayar serta melapor pajak. Sekolah juga mengajak siswa didiknya untuk ikut bela negara. Para guru dan juga siswa-siswi memberikan respon yang positif dari kegiatan ini dan mengapresiasi kegiatan keilmuan lainnya. Kegiatan ini juga akan terus berlanjut ke sekolah lain yang akan di lakukan secara berkala dan juga berkembang ke jenjang pendidikan lainnya seperti SMP. Serangkaian kegiatan pengabdian ini mengajak semua generasi muda ikut terlibat dalam program pemerintah “Pajak Bertutur” agar pikiran mereka tentang pajak itu terbuka dan akan menumbuhkan

rasa sadar pajak yang nantinya akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak agar tercipta penerimaan negara secara berkelanjutan.

Berikut adalah foto kegiatan PKM:



Gambar 3. Foto Pelatihan PKM

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dalam hal ini pas siswa dan siswi SMA serta para guru juga mendapatkan pengetahuan tambahan dalam mengenal, memahami, dan mentransfer pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak sebagai keikut sertaan rakyat sebagai warganegara dalam membangun bangsa. Serta memahami pendapatan dan pengeluaran Negara.

Penyuluhan semacam ini perlu dilakukan secara berkesinambungan agar selain membantu Siswa-siswi SMA dapat mengenal, memahami, dan mentransfer pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak sebagai keikut sertaan rakyat sebagai warganegara dalam membangun bangsa.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan pimpinanNya sehingga kami dapat menyelesaikan pengabdian masyarakat dengan baik dan tepat pada waktunya. Saya dan para team mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah dan guru-guru SMA Kristen Almasih yang telah memberi kesempatan dan telah menyediakan tempat.

REFERENSI

- Kemenkeu. (2021). Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Diakses dari [informasi-apbn-2021.pdf \(kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-apbn-2021.pdf)
- Resmi, S. (2013). Perpajakan: Teori dan Kasus. In Buku 2.
- Septiyani, Nuny & Titi M. Putranti, Titi M. (2013). Penguatan Pengetahuan Perpajakan Bagi Siswa Didik Menuju Voluntary Tax Compliance Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama Dan Sederajat Di Provinsi DKI Jakarta). FISIP UI
- Siti, Masruroh, & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). Diponegoro Journal of Accounting.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



Jakarta, 29 September 2021

Nomor : **101A**-LoA-SENAPENMAS/Untar/IX/2021

Hal : LoA

Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.:
Bapak/Ibu Nataherwin, dan Elyn Mareni
Universitas Tarumanagara

ID Pemakalah: **101A**

Dengan hormat,
Bersama ini kami informasikan bahwa berdasarkan hasil penilaian tim reviewer, makalah Bapak/Ibu dengan judul: **“PENGETAHUAN PAJAK KEPADA SISWA-SISWI SMA KRISTEN ALMASIH”**

Dinyatakan: **Diterima di PROSIDING**

Bapak/Ibu dimohon untuk mengirimkan naskah revisi berdasarkan catatan hasil *review* (terlampir) melalui email: senapenmas@untar.ac.id sebelum **4 Oktober 2021** dengan subjek email dan nama file: **Revisi – ID**.

Kami mohon Bapak/Ibu dapat melakukan **registrasi paling lambat tanggal 11 Oktober 2021**.

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan makalah dalam acara SENAPENMAS 2021 pada tanggal 21 Oktober 2021 yang akan dilaksanakan secara daring.

Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Panitia SENAPENMAS 2021

Nafiah Solikhah, S.T., M.T.

Website : senapenmas.untar.ac.id
Email : senapenmas@untar.ac.id

Luaran Tambahan

PEMAHAMAN PERPAJAKAN SEBAGAI BELA NEGARA KEPADA PARA PELAJAR

*Nataherwin | **Elyn Mareni

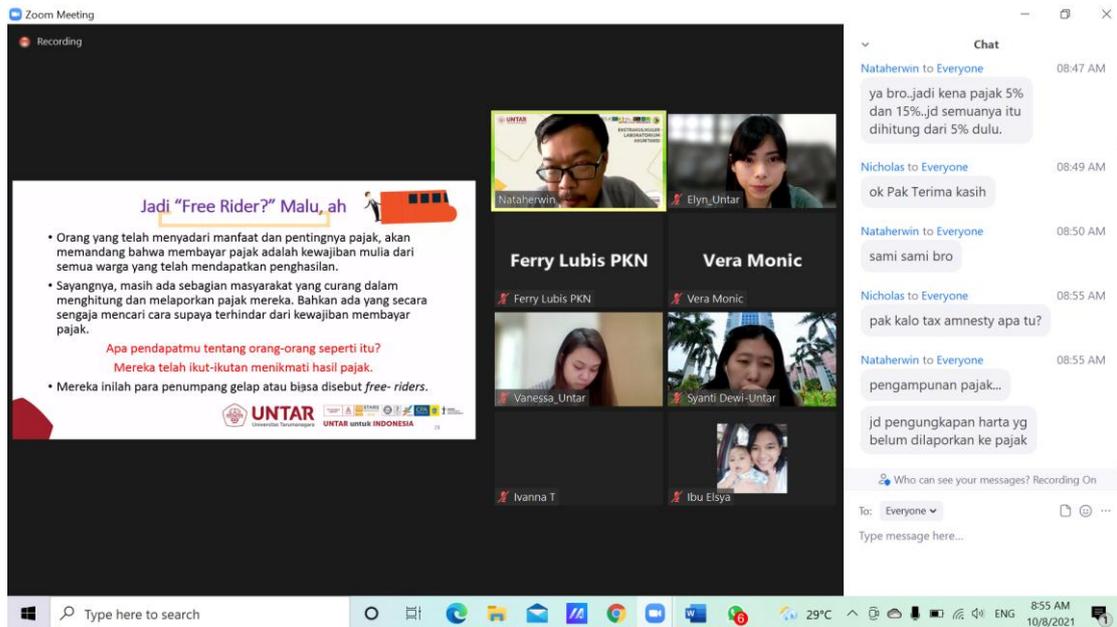
Untuk menjalankan Pemulihan Ekonomi Nasional di masa pandemi ini, pemerintah sendiri memerlukan dana, dan disanalah pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting. Oleh sebab itu, kita sebagai Wajib Pajak harus memiliki kesadaran pajak yang tinggi, karena penerimaan negara tersebut tergantung dengan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan sangatlah penting, hal tersebut akan mendorong kesadaran masyarakat terutama Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada kesempatan kali ini, diadakan penyuluhan kepada siswa-siswi SMA Kristen Almasih dalam bentuk ceramah dan tanya jawab secara online melalui zoom dengan tema "Pajak Sebagai Pembangunan Bangsa" pada 8 Oktober 2021. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan perpajakan serta harus dipupuk sikap sadar dan taat pajak sedari dini, karena kewajiban membayar pajak juga merupakan salah satu aksi bela Negara. Siswa - siswi SMA Kristen Almasih sebagai lulusan yang akan terjun ke dunia kerja maupun usaha maka sudah selayaknya diberikan penyuluhan mengenai kewajiban membayar pajak sebagai warga negara yang baik agar memiliki wawasan yang lebih luas.



Gambar 1. Penyajian Materi kepada Siswa – siswi SMA Kristen Almasih

Materi penyuluhan disajikan dalam bentuk *power point*. Sesi tanya jawab disediakan untuk memperjelas materi bahasan, selain itu dalam rangka evaluasi pemahaman para peserta atas materi yang telah disampaikan, kami juga melaksanakan *kuis* bagi seluruh peserta di penghujung acara. Untuk siapa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat akan diberikan hadiah kepada lima orang siswa. Sedangkan untuk mendapat masukkan atas ketertarikan peserta penyuluhan pada peminatan studi lanjut di bidang akuntansi. Penyebaran angket dilakukan terkait dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini. Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan penyuluhan ini dengan menyebarkan angket mengenai minat topik bahasan dan keberlanjutan kegiatan ini. Kegiatan ini akan dinilai berhasil (memberi dampak atau nilai tambah) jika dari hasil angket disinyalir bahwa banyaknya minat untuk keberlanjutan kegiatan semacam ini.



Gambar 2. Sesi tanya jawab selama kegiatan berlangsung

Pemberian pengetahuan mengenai perpajakan kepada calon wajib pajak khususnya siswa didik dirasakan perlu, karena diasumsikan siswa didik merupakan calon wajib pajak dikemudian hari yang akan menjadi bagian dari masyarakat dan pasti akan melakukan aktivitas ekonomi. Siswa dan siswi SMA ini merupakan generasi muda. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa, sehingga sangat perlu untuk mengetahui apa sih pajak itu, dan manfaat pajak itu apa saja. Karena generasi muda adalah penentu masa depan bangsa ini, suatu saat nanti kalian adalah calon wajib pajak atau pembayar pajak. Acara ini juga dilakukan untuk mengembangkan sikap sadar dan taat pajak, jadi apabila nilai-nilai kesadaran pajak sudah ditanamkan sejak dini kepada peserta didik melalui proses pembelajaran maka itu akan memudahkan pemerintah ke depannya.

Adanya kebijakan yang mengatur mengenai sosialisasi perpajakan bagi masyarakat merupakan faktor pendukung pertama dalam pemberian pengetahuan perpajakan. Menurut Septiyani & Putranti (2013) salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan atau informasi mengenai hak dan kewajiban bagi siswa didik agar dapat hidup di tengah masyarakat, yaitu melalui pendidikan termasuk dalam hal pajak. Siswa didik perlu mengetahui tentang pajak karena pajak merupakan salah satu komponen dalam pembangunan bangsa, hal inilah yang melatarbelakangi adanya pelajaran perpajakan di Sekolah Menengah Pertama.

Kegiatan ini akan menambah kesadaran masyarakat akan pajak akan memberi dampak positif yang tidak hanya ke pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat. Pemerintah membutuhkan pajak dari masyarakat sebagai sumber untuk memenuhi penerimaan anggarannya dan sebagai balasannya pada masyarakat, pemerintah menggantinya dengan memberikan beragam fasilitas umum, infratraktur, subsidi, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kesadaran masyarakat akan pajak itu penting baik bagi pemerintah, maupun masyarakat.

Pemberian edukasi pajak untuk anak SMA juga dalam rangka mempersiapkan mereka yang tidak lama lagi akan terjun ke dunia kerja karena tidak semua lulusan SMA memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, banyak juga yang selepas lulus sekolah menengah langsung bekerja atau berwirausaha. Ketika mereka bekerja menerima penghasilan atau gaji, dan jumlahnya di atas PTKP maka ada kewajiban bagi mereka untuk lapor pajak. Keterlibatan sekolah juga dipilih untuk mengedukasi masyarakat bahwa urusan pajak itu bukan hanya urusan yang terjadi pada orang akuntan atau ekonomi, tetapi pada semua warga negara tidak melihat keilmuannya atau bidang kerjanya apa selama dia memperoleh penghasilan yang memenuhi kriteria maka ia akan menjadi wajib pajak dan memiliki kewajiban perpajakan, salah satunya yaitu lapor pajak. Melihat respon positif dari target, kegiatan ini tidak akan berhenti di sekolah ini saja, tetapi akan dilanjutkan secara berkala ke sekolah-sekolah lain, dan juga jenjang lain.

Dengan rangkaian kegiatan ini diharapkan generasi muda Indonesia akan sadar pajak sejak dini dan berdampak pada meningkatnya kesadaran pajak yang berujung pada kepatuhan pajak dan terciptanya penerimaan negara yang berkelanjutan. Penyuluhan semacam ini perlu dilakukan secara berkesinambungan agar selain membantu Siswa-siswi SMA dapat mengenal, memahami, dan mentransfer pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak sebagai keikutsertaan rakyat sebagai warganegara dalam membangun bangsa.

*Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara

**Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara (125180075)

Browser tabs: widy, (3) V, Inbo, penu, Inbo, ilove, Mer, Lapo, peru, 10 S, Anal, Pinta

Address bar: <https://mail.google.com/mail/u/5/#sent/KtbxLxGcCCNVISINSCPrmVmrkShDFxT1Sg>

Gmail Search: in:sent

Mail navigation: Mail, Inbox, Starred, Snoozed, **Sent**, Drafts, Chat, Spaces, Meet

2 of 204

penulisan artikel

nataherwin nataherwin <nataherwin@fe.untar.ac.id>
to kolompintar

Kpd Bpk/Ibu

saya ingin menyerahkan artikel PINTAR sebagai luaran dari kegiatan PKM kami

terima kasih
Best Regards
Nataherwin

2 Attachments

- pintar.pdf
- pintar.docx

Buttons: Reply, Forward

Windows taskbar: Type here to search, 31°C, ENG, 17:58, 06/12/2021

BUKU CATATAN KEGIATAN PKM

(LOG BOOK)

Surat Tugas Nomor : 1252-Int-KLPPM/UNTAR/IX/2021

1. Judul Penelitian : Penyuluhan Pajak Untuk Pembangunan Bangsa Kepada Siswa-Siswi Sma Kristen Almasih
2. Ketua Tim : Nataherwin, SE, MM
3. NIP : 10108013
4. Anggota : Elyn Mareni

Catatan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat:

No	Tanggal	Kegiatan	Catatan
1	15 Agustus 2021	Melakukan peninjauan ke mitra dan membahas permasalahan mitra	Dilakukan oleh Ketua
2	16 – 31 Agustus 2021	Mulai membuat proposal PKM	Dilakukan oleh Ketua
3	1 – 30 Sept 2021	Melakukan persiapan acara dan menyiapkan modul	Dilakukan oleh semua anggota
2	8 Oktober 2021	Pelaksanaan kegiatan	Dilakukan oleh semua anggota
4	1 Nov – 20 Des 2021	Membuat laporan akhir dan persiapan monev	Dilakukan oleh semua anggota
5	12 Des 2021 - 31 Des 2021	Evaluasi perbaikan laporan akhir	Dilakukan oleh semua anggota

Jakarta, 31 Oktober 2021



Nataherwin, SE, MM
Ketua Tim



UNTAR
Universitas Tarumanagara



No: 1252-Int-KLPPM/UNTAR/IX/2021

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Nataherwin

sebagai

KETUA TIM

Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tarumanagara
Skema Reguler, dengan judul:

**Penyuluhan Pajak Untuk Pembangunan Bangsa Kepada
Siswa-Siswi SMA Kristen Almasih**

yang telah dilaksanakan pada
Juli - Desember 2021

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.